

Implementasi PSAP No. 2 dalam laporan realisasi anggaran di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 3 Nomor 1 2025
Hal. 91-97
DOI: 10.58784/rapi.285

Elisabet Panggabean
Corresponding author:
elisabethpanggabean03@gmail.com
Sam Ratulangi University
Indonesia

Jantje J. Tinangon
Sam Ratulangi University
Indonesia

Heinke R. N. Wokas
Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 17 January 2025
Revised 30 January 2025
Accepted 30 January 2025
Published 31 January 2025

ABSTRACT

Statement of Government Accounting Standards (PSAP) No. 2 in preparing and reporting the Budget Realization Report (LRA) at the Manado City Regional Finance and Assets Agency. The Budget Realization Report is an important component of government financial reports which presents information regarding income, expenditure, surplus/deficit, and funding compared to the budget. This standard requires that the Budget Realization Report be prepared on a cash basis, with income recognized when cash is received and expenses recognized when cash is disbursed. The aim of this research is to determine the implementation of PSAP No. 2 in the budget realization report at the Manado City Regional Finance and Assets Agency. The analytical method used to discuss the problems in this research uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through interviews, documentation and observation. The research results show that the revenue and expenditure recognition process in the Budget Realization Report is in accordance with PSAP No. 2, where income is recognized when cash is received and expenditure when cash is disbursed. The report structure presents a comparison of budget with realization, including budget elements, realization and differences, thereby providing transparency regarding budget achievements. The budget surplus is managed to finance reserves, development investment and debt repayment, while the deficit is overcome through optimizing Original Regional Income (PAD) and budget revision. Implementation of PSAP No. 2 in the Budget Realization Report at the Manado City Regional Financial and Asset Agency is in accordance with applicable standards. The preparation of reports shows transparency and accountability that supports effective and efficient financial decision making.

Keywords: Budget Realization Report; Income; Expenditure

JEL Classification: H11; H61

©2025 Elisabet Panggabean, Jantje J. Tinangon, Heinke R. N. Wokas



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Akuntansi adalah proses sistematis dalam mengidentifikasi, mencatat, mengukur, mengklasifikasikan, meringkas, dan melaporkan informasi keuangan suatu entitas (Fauziah, 2020). Informasi ini digunakan untuk memberikan gambaran keuangan yang akurat dan relevan kepada para pemangku kepentingan, sehingga mereka dapat membuat keputusan ekonomi yang tepat (Weygandt et al., 2021). Akuntansi pemerintahan sebagai sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, mencatat, dan melaporkan transaksi keuangan serta kejadian ekonomi lainnya terkait operasional pemerintah. Sistem ini bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan dan andal kepada para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, legislatif, dan eksekutif untuk pengambilan keputusan yang efektif (Mardiasmo, 2018; Khasanah & Nilasari, 2023). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai perbandingan anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan sebuah entitas. PSAP No. 2 diterapkan untuk menyajikan realisasi anggaran berbasis kas. PSAP 2 ditemukan dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 khususnya terkait pencatatan berbasis akrual dan berbasis kas menuju akrual. Temuan dari Pramusty dan Hasibuan (2023), dan Jocom et al. (2024) mengimplikasikan bahwa pelaporan pemerintah wajib mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Rindengan dan Kapojos (2024) menemukan bahwa PSAP No. 2 adalah

instrumen penting dalam pengendalian dan evaluasi anggaran.

Melalui penerapan standar ini, pemerintah daerah dan pusat dapat mengawasi perubahan saldo anggaran lebih dan memastikan bahwa anggaran yang telah disusun digunakan secara efisien dan sesuai dengan perencanaan. LRA merupakan bagian dari laporan keuangan pemerintah yang penting untuk mengevaluasi kinerja anggaran dan mengukur tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam anggaran. LRA dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan bahwa perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi: (1) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat; (2) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan (3) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Tinjauan pustaka

- **LRA.** LRA adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. LRA merupakan bagian dari laporan keuangan pemerintah yang penting untuk mengevaluasi kinerja anggaran dan mengukur tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam anggaran (Fitriani, 2021; Mutiara et al., 2022; Boja et al., 2023; Mulyanti & Fitri, 2023).
- **Isi LRA.** Dalam PSAP No 2, LRA disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. LRA menyandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan anggarannya. Temuan Yuliyanto et al. (2022), dan

Ramadhianti et al. (2023) mengimplikasikan bahwa informasi yang tepat dalam LRA mampu memberikan dasar pada analisis atas realisasi anggaran.

a. Akuntansi pendapatan

Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah di kompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pendapatan disusun sebagai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah (Halijah & Nurwani, 2022).

b. Akuntansi belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah (Sejati et al., 2024). Khusus pengeluaran melalui Bendahara, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Pada Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

c. Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas

pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

d. Surplus/defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

e. Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pembiayaan berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

f. Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan

penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

g. **Pembiayaan neto**

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

h. **Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)**

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

3. Metode riset

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi PSAP No. 2 dalam LRA. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Proses penelitian ini melibatkan pertanyaan terbuka dimana data dikumpulkan dalam lingkungan partisipan dan data yang diinduktif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan baik melalui wawancara dan dokumentasi dengan pihak informan. Data sekunder yang diperoleh berupa bukti, catatan, atau laporan historis tentang anggaran kegiatan keuangan yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter. Proses analisis dalam penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi masalah utama dalam penerapan PSAP No. 2.
2. Menelaah dokumentasi atau laporan yang relevan.
3. Menghubungkan temuan dengan PSAP No. 2
4. Menarik kesimpulan atas penelitian yang sudah dilakukan.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Proses pengakuan pendapatan dalam LRA sudah sesuai dengan PSAP No. 2. Pendapatan diakui ketika terjadi aliran masuk sumber daya ekonomi yang meningkatkan ekuitas dana lancar pada periode berjalan. Pencatatan dilakukan setelah kas benar-benar diterima, memastikan akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Struktur pendapatan yang dilaporkan meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer, dan pendapatan lain-lain yang sah. Format laporan menyajikan perbandingan antara anggaran yang ditetapkan dengan realisasi, mencakup elemen anggaran, realisasi, dan selisih untuk setiap komponen pendapatan. Hal ini memberikan informasi yang transparan terkait capaian anggaran. Belanja disajikan secara rinci dalam laporan realisasi anggaran, mencerminkan penggunaan anggaran untuk berbagai kebutuhan pemerintah daerah selama periode tertentu.

Belanja transfer disajikan secara terpisah sebagai pengeluaran kepada pihak lain seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, atau entitas yang berhak. Surplus atau defisit dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran sebagai selisih antara pendapatan dan belanja pada periode berjalan. Perhitungan dan penyajian ini dilakukan sesuai dengan PSAP No. 2 yang memberikan gambaran kinerja keuangan pemerintah daerah. Surplus anggaran dikelola dengan cara menyisihkan untuk pembiayaan cadangan, investasi pembangunan, dan pelunasan utang.

Sebaliknya, defisit anggaran diatasi melalui penyesuaian anggaran, optimalisasi PAD, penerimaan pembiayaan, pemanfaatan SiLPA, dan revisi anggaran (APBD Perubahan). Langkah-langkah ini bertujuan menjaga keseimbangan fiskal. Pengeluaran pembiayaan diklasifikasikan dan dicatat secara terpisah dalam laporan realisasi anggaran. Pengeluaran ini tidak memengaruhi surplus atau defisit operasional karena dikelompokkan sebagai pengelolaan sumber daya keuangan. Untuk menjaga keseimbangan anggaran, pengeluaran pembiayaan dikelola melalui perencanaan strategis, pengawasan ketat, dan pengendalian keuangan yang efektif. Hal ini sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan efisiensi yang diatur dalam PSAP No. 2. PSAP No. 2 memberikan pedoman yang jelas untuk pengelolaan jenis-jenis pembiayaan dalam pelaksanaan anggarannya. Ketentuan ini memastikan pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan efisien, sekaligus memperkuat pengawasan penggunaan sumber daya publik.

Pembahasan

Pendapatan diakui saat terjadi aliran masuk sumber daya ekonomi yang meningkatkan ekuitas dana lancar selama periode berjalan. Pencatatan dilakukan berdasarkan basis kas, yaitu saat pendapatan benar-benar diterima, sesuai dengan prinsip akuntansi yang memastikan transparansi dan akuntabilitas. Pendapatan dalam laporan realisasi anggaran disusun dalam format yang mencantumkan komponen-komponen utama, seperti PAD, transfer, pendapatan yang lain-lain sah. Format mencakup anggaran, realisasi, dan selisih untuk memberikan informasi perbandingan yang jelas antara target dan capaian.

Belanja disajikan secara khusus dalam laporan realisasi anggaran, menunjukkan penggunaan dana untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah daerah selama periode tertentu. Penyajian ini

bertujuan mencerminkan efisiensi pengelolaan anggaran. Belanja transfer disajikan secara khusus dalam laporan realisasi anggaran untuk menggambarkan pengeluaran kepada pihak lain, termasuk transfer ke pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, atau entitas lain yang berhak menerima dana tersebut. Penyajian ini mengikuti format yang memisahkan belanja transfer dari belanja operasional lainnya.

Surplus atau defisit dihitung sebagai selisih antara pendapatan dan belanja selama periode anggaran berjalan. Hasil perhitungan ini dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran untuk memberikan gambaran tentang kondisi keuangan pemerintah daerah, baik dalam keadaan surplus maupun defisit. Surplus dikelola dengan alokasi pencadangan, investasi, atau pelunasan utang. Sedangkan, defisit diatasi melalui penyesuaian anggaran, optimalisasi PAD, penerimaan pembiayaan, pemanfaatan SiLPA, atau revisi anggaran (APBD perubahan).

Pengeluaran pembiayaan diklasifikasikan sebagai transaksi yang tidak memengaruhi surplus atau defisit operasional, tetapi dikelompokkan sebagai aktivitas pengelolaan sumber daya keuangan, seperti pembayaran utang atau investasi jangka panjang. Untuk menjaga keseimbangan anggaran, pengeluaran pembiayaan dikelola melalui perencanaan yang cermat, pengawasan rutin, dan pengendalian yang ketat, memastikan pengeluaran tetap sesuai dengan alokasi dan mendukung prioritas pembangunan. Jenis pembiayaan mencakup penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, seperti pinjaman daerah, pengelolaan SiLPA, atau penerbitan obligasi. Ketentuan PSAP No. 2 memastikan bahwa semua transaksi pembiayaan dilaporkan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik.

5. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. LRA dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado sudah sesuai dengan PSAP Nomor 2 tentang LRA. LRA menyajikan sumber pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang masing masing di perbandingkan dalam suatu periode. LRA harus diidentifikasi secara jelas dan diulang pada setiap nomor halaman laporan, nama entitas, periode yang dicakup, mata uang pelaporan dan satuan angka yang digunakan. LRA dilaporkan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan entitas menyajikan LRA selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
2. Pendapatan LRA diakui berbasis kas saat terjadi aliran masuk sumber daya ekonomi, mencakup PAD, transfer, dan pendapatan lain-lain yang sah, dengan penyajian yang transparan antara anggaran dan realisasi.
3. Belanja LRA disajikan secara rinci sesuai kebutuhan daerah, termasuk belanja transfer yang dipisahkan berdasarkan penerimaannya.
4. Surplus/defisit dilaporkan sebagai selisih pendapatan dan belanja, dengan surplus dikelola untuk pembiayaan cadangan, investasi, dan pelunasan utang, sementara defisit diatasi melalui optimalisasi PAD, penerimaan pembiayaan, dan revisi anggaran.
5. Pembiayaan LRA diakui ketika terjadi aliran masuk atau keluar sumber daya keuangan yang tidak mempengaruhi surplus atau defisit anggaran

Daftar pustaka

Boja, A. W., Sopanah, A., & Puspitosarie, E. (2023). Analisis efektivitas dan penyajian PSAP No 02 pada Dinas Sosial Kota Malang tahun 2020-2022. *Journal of Innovation Research and*

- Knowledge*, 3(4), 845-854.
<https://doi.org/10.53625/jirk.v3i4.6548>
- Fauziah, F. (2020). *Pengantar Dasar Akuntansi Buku 1: Teknik dan Konsep Penyusunan Laporan Keuangan*. Muhammadiyah University Press.
[https://minio.umkt.ac.id/simpelv2-media/karya/buku/ff230/e-Book Pengantar Dasar Akuntansi Buku 1 141220 1.pdf](https://minio.umkt.ac.id/simpelv2-media/karya/buku/ff230/e-Book%20Pengantar%20Dasar%20Akuntansi%20Buku%201%20141220%201.pdf)
- Fitriani. (2021). Penerapan penyajian Laporan Realisasi Anggaran sudah sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 pada Kantor Camat Batui Kabupaten Banggai. *Jurnal Sinar Manajemen*, 8(2), 75-80.
<https://doi.org/10.56338/jsm.v8i2.1641>
- Halijah, N., & Nurwani. (2022). Analisis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran untuk menilai kinerja keuangan (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(4), 365-372.
<https://doi.org/10.35145/bilancia.v6i4.2248>
- Jocom, A. M., Budiarso, N. S., & Afandi, D. (2024). Evaluasi perlakuan akuntansi di badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah Kota Tomohon. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 473-486.
<https://doi.org/10.58784/rapi.236>
- Khasanah, U., & Nilasari, A. P. (2023). Analisis implementasi penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan*, 3(1), 279-288.
<https://doi.org/10.55047/transekonomika.v3i1.381>
- Mardiasmo (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.
- Mulyanti, D., & Fitri, A. (2023). Dampak rencana kerja anggaran dan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada kinerja keuangan. *Ekono Insentif*, 17(1), 12-23.
<https://doi.org/10.36787/jei.v17i1.975>

- Mutiara, Y. C., Dethan, M. A., & Tameno, N. (2022). Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang. *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(8), 582–591. <https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/nautical/article/view/415>
- Pramusty, M. A., & Hasibuan, N. F. A., (2023). Analisis kinerja realisasi anggaran pendapatan belanja daerah pada Badan Keuangan Aset Dearah Pemerintah Kota Medan. *Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, 1(4), 150-164. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v1i4.341>
- Ramadhianti, N. A. N., Agita, S. P., Putri, M. K., Cahyaningtyas, Y. K., & Manurung, H. (2023). Analisis kinerja realisasi anggran pendapatan dan belanja daerah pada Pemerintahan Kabupaten Magelang tahun 2018-2022. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak*, 1(2), 212-223. <https://doi.org/10.61132/jieap.v1i2.150>
- Rindengan, A. M. T., & Kapojos, P. M. (2024). Evaluasi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi kasus pada Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon). *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 288–298. <https://doi.org/10.58784/rapi.190>
- Sejati, M. S., Siboro, S. F., Apriliyani, N., & Aulia, S. (2024). Analisa realisasi anggaran belanja pada Pemerintah Kota Depok tahun 2021-2022. *Kajian Ekonomi dan Akuntansi Terapan*, 1(2), 137–150. <https://doi.org/10.61132/keat.v1i2.157>
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Mitchell, J. E. (2021). *Accounting principles*, 14th Ed. John Wiley & Sons, Inc.
- Yuliyanto, W., Khasanah, U., & Umami, R. (2022). Analisis efisiensi dan efektivitas anggaran APBD terhadap realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Abc periode 2018-2020. *Jurnal E-Bis*, 6(2), 456-468. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v6i2.989>